

Strategi Komunikasi Digital pada Badan Pengawas Pemilihan Umum: Studi Kasus Peningkatan Partisipasi Publik melalui Media Sosial

Qonita Muslikhatun Amalia¹, Afifatus Sholikhah^{1*}

¹Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi publik melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi media sosial selama periode pemilu 2024. Temuan menunjukkan bahwa strategi utama Bawaslu meliputi penyebaran konten edukatif, interaksi partisipatif melalui fitur media sosial, dan kombinasi pendekatan digital luring. Strategi ini berhasil meningkatkan keterlibatan publik, yang terlihat dari peningkatan interaksi di platform seperti Instagram serta pelaporan pelanggaran pemilu oleh masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan akses digital di daerah terpencil masih menjadi kendala. Studi ini menawarkan kontribusi baru dalam memahami bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi melalui pengawasan pemilu.

Kata kunci

Bawaslu; Komunikasi Digital; Media Sosial; Partisipasi Publik

Abstract

This study aims to analyze the digital communication strategy implemented by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Sidoarjo Regency in increasing public participation through social media. The research method used is qualitative with a case study approach, involving in-depth interviews, direct observation, and analysis of social media documentation during the 2024 election period. The findings show that Bawaslu's main strategies include the dissemination of educational content, participatory interaction through social media features, and a combination of digital offline approaches. This strategy has succeeded in increasing public engagement, as seen from the increase in interaction on platforms such as Instagram and reporting of election violations by the public. However, challenges such as limited human resources and digital access in remote areas are still obstacles. This study offers a new contribution to understanding how social media can be utilized to strengthen democracy through election supervision.

Keywords

Bawaslu; Digital Communication; Social Media; Public Participation

Pendahuluan

Komunikasi digital telah menjadi aspek krusial dalam era informasi modern, di mana kecepatan dan efisiensi penyampaian informasi menjadi sangat penting. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, organisasi pemerintah dan swasta dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan ini (Maulvi et al., 2023). Media sosial, khususnya, menawarkan platform yang memungkinkan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mempercepat respon terhadap isu-isu publik (Ansyar & Junianto, 2023). Dalam konteks ini, komunikasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan publik (Arianto, 2022; Hayati, 2022). Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemerintah untuk mengembangkan strategi komunikasi digital yang efektif guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kritis dan terinformasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu, Bawaslu perlu memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi terkait proses pemilu dan mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih (Putri et al., 2024). Penggunaan media sosial memungkinkan Bawaslu untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan memberikan masukan (Banurea, 2023). Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemilu.

Tantangan dan peluang dalam penggunaan media sosial untuk pengawasan pemilu sangatlah kompleks. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan partisipasi, namun di sisi lain, terdapat risiko penyebaran informasi yang salah dan potensi manipulasi (Yadnya & Warastuti, 2023). Selain itu, tantangan dalam mengawasi kampanye berbasis digital juga memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara Bawaslu dan berbagai pemangku kepentingan (Banurea, 2023; Daherman & Wulandari, 2024). Meskipun demikian, peluang untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan pemilu sangat besar, terutama dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu untuk mengembangkan strategi yang dapat memaksimalkan manfaat media sosial sambil meminimalkan risiko yang ada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana strategi komunikasi digital Bawaslu diterapkan untuk meningkatkan partisipasi publik? Kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan strategi komunikasi digital Bawaslu? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas strategi yang diterapkan oleh Bawaslu dalam konteks pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bawaslu memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi publik dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan strategi tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai strategi komunikasi digital pada Bawaslu menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur yang membahas secara mendalam tentang efektivitas media sosial dalam meningkatkan partisipasi publik. Penelitian oleh Maulvi et al., (2023) membahas pentingnya keakuratan dan transparansi dalam iklan digital selama pemilihan umum, serta tantangan dalam mengawasi penyebaran informasi yang salah. Kelemahan dari penelitian ini adalah fokusnya yang lebih pada iklan digital dan tidak secara spesifik membahas peran Bawaslu dalam pengawasan media sosial, sehingga tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Bawaslu. Penelitian oleh Saksono (2020), mengeksplorasi dampak digitalisasi pada pemilihan lokal dan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan pengamat. Kelemahan dari penelitian ini adalah kurangnya analisis mendalam tentang bagaimana Bawaslu dapat memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan partisipasi publik, serta tidak membahas secara spesifik tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam konteks pemilu. Penelitian oleh Putri et al., (2024) bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi komunikasi digital Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi publik dan mengidentifikasi efektivitas media sosial sebagai alat komunikasi publik. Penelitian oleh Kharas et al., (2023) menyatakan bahwa kurangnya fokus pada Bawaslu dan peranannya dalam pengawasan pemilu,

serta tidak memberikan analisis tentang efektivitas strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Bawaslu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis penggunaan media sosial, sementara sedikit yang mengeksplorasi dampaknya terhadap partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi komunikasi digital Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi publik dan mengidentifikasi efektivitas media sosial sebagai alat komunikasi publik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan strategi komunikasi digital yang lebih baik di masa depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam meningkatkan partisipasi publik melalui media sosial. Teori komunikasi digital menjadi landasan utama, dengan fokus pada komunikasi dua arah dan interaksi yang membangun kepercayaan serta keterlibatan publik (Njie & Asimiran, 2024). Lokasi penelitian adalah Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, yang dipilih karena perannya yang strategis dalam pengawasan pemilu di tingkat lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf humas Bawaslu, observasi langsung terhadap aktivitas media sosial, dan dokumentasi konten media sosial seperti Instagram dan Facebook selama periode pemilu tahun 2024.

Proses penelitian mencakup beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga analisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi peran mereka terhadap fokus penelitian (Darko et al., 2022). Pengumpulan data dilakukan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan analisis dokumentasi media sosial. Temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk pengembangan strategi komunikasi digital Bawaslu, dengan tujuan meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi melalui media sosial.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi publik melalui media sosial. Beberapa strategi utama yang digunakan meliputi penggunaan konten edukatif, yang mencakup informasi penting seperti tata cara pemilihan, hak dan kewajiban pemilih, serta larangan politik uang (Wati & Delima, 2022). Selain itu, pendekatan partisipatif juga menjadi strategi penting dengan mengundang masyarakat untuk secara aktif berkontribusi dalam pengawasan pemilu melalui pelaporan pelanggaran. Interaktivitas di media sosial melalui fitur-fitur seperti komentar, polling, dan sesi tanya jawab semakin memperkuat keterlibatan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik secara keseluruhan (Purnomo et al., 2024).

Efektivitas media sosial terlihat dari peningkatan yang signifikan dalam jumlah interaksi di platform seperti Instagram. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah komentar, likes, dan shares pada unggahan yang terkait dengan pemilu (Razali & Dyanasari, 2024). Tidak hanya itu, tingkat partisipasi pemilih lokal juga menunjukkan peningkatan yang nyata, sebagaimana terlihat dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu. Strategi ini berhasil menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga integritas proses demokrasi. Namun, penerapan strategi ini juga dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam tim pengelola media sosial, yang membuat Bawaslu kesulitan menjangkau seluruh elemen masyarakat secara maksimal. Selain itu, kesulitan menjangkau daerah terpencil akibat keterbatasan akses digital menjadi hambatan dalam memastikan penyebaran informasi secara menyeluruh. Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun strategi komunikasi digital memberikan dampak positif yang signifikan, masih diperlukan perbaikan dan dukungan yang lebih besar untuk mengatasi tantangan tersebut.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Gambar 1. Menunjukkan bahwa salah satu bentuk implementasi strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan terintegrasi dengan kegiatan luring, seperti patroli hak pilih. Dalam konteks ini, gambar tersebut memperlihatkan koordinasi atau diskusi kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sesi diskusi ini juga mencerminkan upaya membangun hubungan langsung dengan masyarakat lokal untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Kegiatan seperti ini menjadi bagian dari strategi komunikasi digital yang berhasil menggerakkan tindakan nyata di lapangan, didukung oleh kampanye media sosial. Dengan menggabungkan pendekatan online melalui infografik dan video edukatif serta offline melalui diskusi langsung, Bawaslu mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, meskipun masih dihadapkan dengan tantangan seperti keterbatasan akses internet di daerah tertentu. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa pendekatan hybrid (digital dan luring) memberikan dampak positif yang signifikan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan dari studi sebelumnya yang menegaskan efektivitas media sosial sebagai alat komunikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tetapi juga berhasil memperkuat transparansi dalam proses pemilu (Zubair et al., 2018). Strategi berbasis media sosial ini menunjukkan potensi besar dalam mendorong keterlibatan publik, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih aktif menggunakan platform digital. Keberhasilan ini memberikan model komunikasi digital yang dapat menjadi acuan bagi lembaga lain dalam konteks pengawasan publik (Banurea, 2023).

Meski demikian, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan efektivitas strategi ini. Salah satu kritik utama adalah kebutuhan pelatihan intensif bagi staf Bawaslu dalam pengelolaan media sosial. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menciptakan konten yang relevan dan menarik, serta mengelola interaksi publik secara optimal. Selain itu, kolaborasi dengan influencer lokal menjadi salah satu saran yang penting. Influencer lokal memiliki potensi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh pendekatan komunikasi konvensional. Penelitian ini memiliki relevansi praktis dan akademik yang signifikan. Secara praktis, hasil ini memberikan panduan yang berharga bagi lembaga pemerintah lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan komunikasi digital dalam menyampaikan pesan-pesan penting kepada publik. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian komunikasi strategis berbasis teknologi, khususnya terkait dengan pengelolaan lembaga publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membantu meningkatkan efektivitas komunikasi Bawaslu tetapi juga memperkaya literatur terkait strategi komunikasi digital dalam pengawasan publik.

Penerapan strategi komunikasi digital oleh Bawaslu membuka peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut. Adopsi teknologi baru, seperti fitur live streaming di media sosial, dapat digunakan untuk menjangkau audiens lebih luas secara real-time. Selain itu, segmentasi audiens berdasarkan usia, lokasi, atau kebutuhan informasi tertentu memungkinkan penyampaian pesan yang lebih spesifik dan relevan. Strategi semacam ini dapat meningkatkan keterlibatan publik dan efektivitas komunikasi secara keseluruhan (Sari et al., 2023). Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait kesenjangan digital yang membatasi jangkauan strategi komunikasi di daerah dengan akses internet terbatas. Selain itu, keberlanjutan kampanye digital memerlukan dukungan sumber daya manusia dan finansial yang konsisten. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi dengan pemerintah dan pihak eksternal, seperti donor atau organisasi masyarakat, sangat diperlukan.

Dari perspektif global, pendekatan komunikasi digital Bawaslu dapat dibandingkan dengan praktik serupa di negara lain. Tren global menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat utama dalam mendorong partisipasi publik dalam pemilu, sehingga pengalaman Bawaslu memberikan pelajaran penting dalam konteks internasional. Penyesuaian strategi dengan kebutuhan lokal tetap menjadi kunci untuk keberhasilan program ini. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari strategi komunikasi digital terhadap tingkat kepercayaan publik pada lembaga pengawas pemilu. Selain itu, pengembangan indikator keberhasilan yang lebih terukur, seperti indeks keterlibatan publik atau skor kepercayaan masyarakat, dapat menjadi alat evaluasi yang efektif dalam mengukur dampak program komunikasi digital di masa mendatang.

Limitasi

Kajian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbatas pada cakupan data yang hanya berfokus pada implementasi strategi komunikasi digital Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah atau konteks lain.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan partisipasi publik melalui media sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu berhasil memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui penyebaran konten edukatif dan partisipatif, seperti tata cara pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pelaporan pelanggaran. Interaksi dua arah melalui fitur seperti komentar, polling, dan sesi tanya jawab juga memperkuat hubungan antara Bawaslu dan masyarakat. Selain itu, kombinasi pendekatan digital dan luring terbukti efektif dalam menjangkau lebih banyak segmen masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan tantangan dalam menjangkau daerah dengan akses internet terbatas.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi komunikasi digital di lembaga pemerintah lainnya, terutama dalam konteks pengawasan publik. Implikasi praktisnya adalah perlunya pelatihan intensif bagi staf pengelola media sosial dan kolaborasi dengan influencer lokal untuk memperluas jangkauan. Penelitian mendatang disarankan untuk menganalisis dampak jangka panjang strategi komunikasi digital terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu, serta mengembangkan indikator keberhasilan yang lebih terukur, seperti indeks keterlibatan publik atau skor kepercayaan masyarakat. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas pada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk konteks yang lebih luas.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo atas dukungan dan kerja samanya dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ansyar, L., & Junianto, J. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Publikasi oleh Humas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(2), 158–164. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.84>
- Arianto, B. (2022). Peran Media Sosial Dalam Penguatan Komunikasi Bisnis Kewargaan di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 4(2), 132–146. <https://doi.org/10.36423/jumper.v4i2.1148>
- Banurea, O. K. (2023). Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital. *Mediation : Journal Of Law*, 59–77. <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i1.1356>
- Daherman, Y., & Wulandari, H. (2024). Simulacra Politics: Digital Advertising for the 2024 Presidential Election on Social Media. *Journal La Sociale*, 5(2), 411–419. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i2.1113>
- Darko, E. M., Kleib, M., & Olson, J. (2022). Social Media Use for Research Participant Recruitment: Integrative Literature Review. *Journal of Medical Internet Research*, 24(8), e38015. <https://doi.org/10.2196/38015>
- Hayati, N. N. (2022). Menakar Efektifitas Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(1), 11–25. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.151>
- Kharas, A., Setiyono, B., & Yuwanto, Y. (2023). Institutional System Reform in the General Election Commission Through the Implementation of Digital-Based Applications. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2778–2785. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1698>
- Maulvi, H. R., Rizal, E., & Lusiana, E. (2023). Peran Media Sosial Bagi Humas Pemerintah. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 92–101. <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.14939>
- Njie, B., & Asimiran, S. (2024). Case Study as a Choice in Qualitative Methodology. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME)*, 4(3), 35–40. <https://doi.org/10.9790/7388-04313540>
- Purnomo, A., Firdaus, M., Firdausi, N., Rosyidah, E., Anam, F., Pratama, F. C., & Carrollina, D. (2024). *E-business in digital economy: A systematic literature review*. 050009. <https://doi.org/10.1063/5.0192363>
- Putri, L. U. M., Pebrianti, A., Elonika, Y., & Winarti, N. (2024). Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 40–57. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21741>
- Razali, G., & Dyanasari, R. (2024). Public Relations Vindes Media Corp di Era Post-Truth: Evolusi Psikologis Persepsi Masyarakat Urban. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.31294/jjpr.v5i1.3311>
- Saksono, H. (2020). Digital Pilkada: Have Local Elections (Pilkada) been Affected by Digitalization? Attainment, Challenges, and Policy Solutions. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 287–299. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.287-299>

- Sari, F. M., Yusnadi, Y., & Samosir, H. E. (2023). Struktur Sosial Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Klasik, Humanis, Integratif, dan Kontemporer. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4(2), 334. <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i2.12415>
- Wati, L., & Delima, I. D. (2022). Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(1), 10–16. <https://doi.org/10.33592/jiia.v12i1.3246>
- Yadnya, I. D. G. S. A., & Warastuti, D. (2023). Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Konsumtif dan Persepsi Diri Remaja di Jakarta: Studi Mengenai Interaksi Online, Pengaruh Endorsement, dan Dampak Psikologis. *Jurnal Psikologi Dan Konseling West Science*, 1(05), 250–260. <https://doi.org/10.58812/jpkws.v1i05.852>
- Zubair, F., Dewi, R., & Kadarisman, A. (2018). Strategi Komunikasi Publik Dalam Membangun Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan PTNBH. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 74. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i2.1328>